

Sekilas proyek*



**Penguatan tata
kelola sanitasi
untuk kota kecil di
Sumatera, Indonesia**

Pilihan tema-tema kunci untuk pemerintah daerah dan pengambil kebijakan

Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki dan memperkuat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan sanitasi melalui proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Studi ini melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota kecil di 6 wilayah di Sumatera, untuk berbagi pengalaman (positif dan negatif) dimasing-masing wilayah dengan berbagai issue yang terkait dengan pemerintahan serta dampaknya terhadap pelayanan sanitasi.

TENTANG PENULIS

The Institute for Sustainable Futures (ISF) didirikan oleh Universitas Teknologi Sydney (UTS) untuk bekerja dengan industry, pemerintah dan masyarakat untuk membangun masa depan yang berkelanjutan melalui penelitian dan konsultasi. Misi kami adalah menciptakan perubahan menuju masa depan berkelanjutan yang melindungi dan memperkuat lingkungan, kesejahteraan manusia dan persamaan social. Kami berusaha untuk mengadopsi pendekatan interdisipliner dalam bekerja dan melibatkan mitra-mitra kami dalam proses kolaborasi yang menekankan pada strategi pengambilan keputusan.

Tim peneliti ISF: Joanne Chong, Kumi Abeysuriya, Katie Ross and Juliet Willetts

Kemitraan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan ("Partnership") adalah sebuah organisasi multi-pihak yang bertujuan untuk memajukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) di berbagai sektor di tingkat nasional maupun daerah. Partnership secara berdampingan bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO) mitra pembangunan internasional di Indonesia dan sektor usaha untuk mendorong reformasi tata kelola di tingkat nasional maupun daerah.

Tim peneliti Partnership: Lenny Hidayat, Hery Sulistio, Ina Loekman

SNV Netherlands Development Organisation merupakan sebuah organisasi pembangunan internasional yang bersifat non-profit. SNV telah membangun dalam jangka waktu yang panjang di 39 negara termiskin di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tim yang terdiri dari konsultan lokal dan internasional bekerjasama dengan mitra lokal untuk membantu masyarakat, usaha dan organisasi dengan peralatan, pengetahuan dan koneksi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan akses ke pelayanan dasar - memberdayakan mereka untuk memutus siklus kemiskinan melalui pemberdayaan diri.

Tim peneliti SNV: Nyoman Suartana, Maria Carreiro.

Bappenas, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, memberikan izin untuk pelaksanaan penelitian, memberikan masukan strategis dan berpartisipasi pada lokakarya-lokakarya penting.

Tim peneliti Bappenas: Fany Wedahuditama

KUTIPAN

ISF-UTS, Kemitraan & SNV (2015) memperkuat tata kelola pemerintahan untuk kota dan kota kecil di Sumatra, Indonesia – pilihan tema-tema kunci untuk pemerintah daerah dan pengambil kebijakan. Makalah Singkat. Institute for Sustainable Futures at the University of Technology Sydney (Australia), Kemitraan Partnership for Governance Reform (Indonesia) and SNV Netherlands Development Organisation Indonesia.

TERIMA KASIH

Tim riset ingin menghaturkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada semua peserta riset di ke-enam daerah sasaran studi kasus ini, termasuk perwakilan dari Pokja Sanitasi, para Walikota, Sekda, dan kelompok-kelompok masyarakat, LSM dan media dari kabupaten/kota di Sumatra sebagai berikut: Payakumbuh, Lampung Selatan, Sawahlunto, Pariaman, Pringsewu, Metro Lampung. Kami juga menghaturkan terima kasih atas dukungan dan pengakuan melalui kontribusi yang signifikan dari pihak-pihak di tingkat Pusat yaitu Kementerian Perencanaan dan Pembangunan (BAPPENAS), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan, dan USDP.

Informasi lanjut

Nyoman Suartana, NSuartana@snyworld.org

Lenny Hidayat, lenny.hidayat@kemitraan.or.id

Joanne Chong, Joanne.Chong@uts.edu.au

Foto dalam laporan ini adalah dari lokakarya proyek dan kunjungan lapangan terkait dengan proyek penelitian ini. Foto sampul adalah dari koleksi Organisasi Pembangunan SNV, digunakan dengan izin.

Pandangan yang diungkapkan dalam laporan ini merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari Initiative Indonesia Infrastructure (IndII) atau Program Bantuan Australia. Kesalahan fakta atau interpretasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.



Penguatan tata kelola sanitasi untuk kota kecil di Sumatera, Indonesia

Pilihan tema-tema kunci untuk pemerintah daerah dan pengambil kebijakan

KILASAN PROYEK INI merangkum beberapa temuan utama riset kami tentang tata kelola pemerintahan dan tata laksana institusional pemerintah daerah khususnya di bidang sanitasi air limbah yang mencakup proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya di kota-kota kecil di Sumatera, Indonesia.

Riset ini berlangsung dari bulan Agustus 2014 hingga Mei 2015 dan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Institute for Sustainable Futures (ISF) at the University of Technology Sydney (UTS), Kemitraan Partnership for Governance Reform, SNV Netherlands Development Organisation, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penelitian partisipatif ini didanai oleh Australian Aid's Australia Indonesia Infrastructure Research Awards (AIIRA).

Sebanyak enam studi kasus dilaksanakan di enam kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung, melibatkan 135 responden (75 staf pemerintah lokal dan perwakilan dari masyarakat sipil, media, para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan nasional) yang berpartisipasi dalam rangkaian diskusi terarah, wawancara, pertemuan dan lokakarya partisipatif.

Riset ini mencari beberapa faktor tata kelola yang mempengaruhi kapasitas pemerintah lokal dalam merencanakan dan melaksanakan layanan sanitasi melalui proses pembuatan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK), yang sejalan dengan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Peserta studi kasus menceritakan pengalaman mereka (baik positif maupun negatif) dalam melakukan perencanaan sanitasi di enam

kabupaten/kota, yang menyentuh banyak aspek tata kelola serta dampaknya terhadap layanan sanitasi.

Selain menggali pengalaman pemerintah lokal di tingkat kabupaten/kota, riset ini juga menganalisis bahwa perencanaan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh tata laksana institusi di tingkat provinsi dan pemerintah pusat.

Dokumen ini, tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, memaparkan rangkuman sintesis temuan-temuan utama yang relevan bagi peserta dari pemerintah lokal dan pemangku kepentingan lain yang tertarik akan isu ini. Bagi para pembaca, sangat disarankan agar dapat menggunakan rangkuman ini sebagai bahan diskusi untuk meningkatkan layanan sanitasi di daerah masing-masing.

Beberapa temuan utama yang didiskusikan dalam rangkuman ini adalah sebagai berikut:

1. Melampaui Target Bebas BAB Sembarangan (BABS)
2. Peran Pokja Sanitasi
3. Tantangan Alokasi Anggaran untuk Air Limbah
4. Investasi Air Limbah Bergantung pada Sumber-Sumber Pembiayaan
5. Ide-ide Pemerintah Lokal untuk Meningkatkan Layanan Air Limbah

Untuk penjabaran yang lebih komprehensif, seluruh studi kasus, temuan dan implikasinya, silakan merujuk pada laporan teknis "Penguatan Tata Kelola Sanitasi untuk Kabupaten/kota Kecil" yang dilampirkan pada rangkuman ini.

Gambar 1: Risiko-risiko kesehatan yang disebabkan patogen kontaminasi karena sistem atau penanganan sanitasi yang efektif. treatment



The Philippine Sanitation Alliance (USAID 2008)

Tema 1 / Melampaui target “bebas BAB sembarangan”

Tujuan utama perencanaan air limbah dan layanan adalah untuk menjaga batasan aman antara kotoran manusia, kotoran lainnya dari sumber-sumber air.ⁱ Layanan Air limbah yang efektif haruslah memisahkan seluruh patogen limbah dari manusia dan lingkungannya.

Tim peneliti menemukan adanya penekanan kuat untuk menurunkan kasus BABS guna mencapai target “Bebas BABS” di tingkat kabupaten/kota. Strategi ini menghasilkan prestasi yang cukup menggembirakan khususnya di tingkat perubahan perilaku dan di beberapa kasus, terdapat peningkatan penggunaan toilet.

Namun, di area perkotaan seperti kota-kota kecil, dengan kepadatan populasi yang cukup padat dan penggunaan toilet otomatis yang sering, fokus pada peningkatan jumlah pemakaian toilet tidaklah cukup.

Hal ini dapat terjadi karena begitu banyak cara patogen air limbah dapat membawa pengaruh buruk bagi kesehatan manusia. Beberapa cara antara lain kebocoran atau meluapnya penampungan limbah kotoran dari septik tank individu maupun sistem komunal dan infrastruktur lainnya ke sumber air, sistem drainase atau air permukaan, bisa juga melalui praktik-praktik yang tidak aman ketika memindahkan limbah kotoran padat, pemindahan yang kurang aman, penanganan dan pembuangan ilegal.

Kontaminasi masih dapat terjadi meskipun bergantung pada jenis dan kualitas penggunaan toilet (teknologi yang digunakan untuk membuang kotoran) dan ketersediaan penanganan limbah dan mekanisme transportasi limbah.

Dari perspektif kesehatan, beberapa cara tersebut membuka kemungkinan risiko terjangkitnya patogen pada manusia (sebagai contoh kemungkinan risiko dapat dilihat pada Gambar 1).

tip*

Memperoleh dan mempublikasikan bukti adanya kontaminasi patogen limbah padat di sumber-sumber air lokal dapat memicu komitmen dan tindak lanjut guna meningkatkan kinerja layanan sanitasi. Kontaminasi seperti ini biasa terjadi di kota-kota yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Di dua studi kasus Program SAIIG (untuk investasi di jaringan sanitasi) menyebutkan bahwa bakteri *E. coli* telah terdeteksi di sumber air permukaan. Salah satu kota studi kasus ini menyebutkan kasus kontaminasi sebagai alasan untuk ikut berpartisipasi dalam Program SAIIG dan meningkatkan infrastruktur dan layanan sanitasi.

Target Bebas BABS adalah langkah awal yang sangat penting, namun jika hanya fokus mencapai tujuan tersebut, dapat mengalihkan tujuan sebenarnya dari sanitasi— dan kebutuhan fasilitasi sanitasi yang lain seperti infrastruktur dan layanan satu siklus sanitasi yang penuh, dari toilet, penampungan, pemindahan, penanganan dan pembuangan/daur ulang.

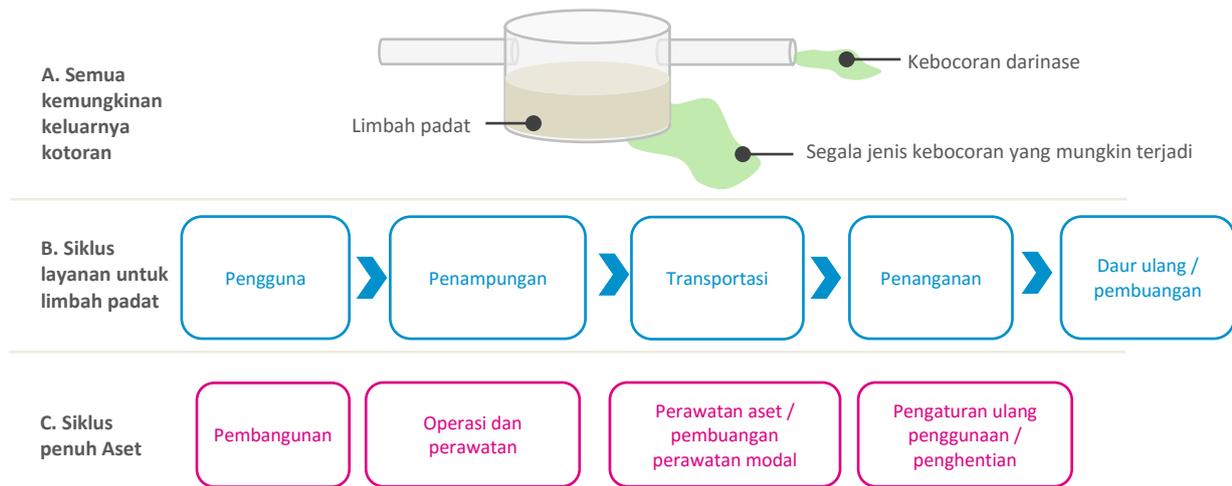
Mencapai status Bebas BABS sejalan dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang menekankan peningkatan akses “sanitasi dasar”, yang didefinisikan sebagai akses jamban yang memadai.ⁱⁱ The Sustainable Development Goals (SDGs) (pengganti MDGs in 2016) menarik fokus target ke pemenuhan standard manajemen air limbah yang berkelanjutan.ⁱⁱⁱ

Target SDGs juga mempromosikan pendaur-ulangan produk-produk air limbah guna meningkatkan nilai tambah sanitasi. Banyak peserta studi kasus yang berpendapat jika layanan air limbah dapat dilihat sebagai peluang untuk meraup untung dari daur ulang limbah, pemerintah kabupaten/kota pasti akan memprioritaskan isu ini.

Dalam rangka mencapai tujuan utama layanan sanitasi air limbah, yaitu lingkungan dan manusia yang sehat, sangatlah penting untuk mempertimbangkan:

- Siklus penuh penggunaan aset – memastikan fungsi-fungsi teknologi bekerja dengan baik dan digunakan secara efektif dan efisien setelah pembangunan dengan membangun mekanisme operasi yang tepat guna, perawatan dan pembaharuan aset (perawatan aset) hingga rampung.

Gambar 1: Siklus dan Perspektif Sistem Makro Layanan Air Limbah^{iv}



- Rantai layanan sanitasi yang lengkap – Melalui rantai siklus layanan sanitasi dari pengguna, penampungan, pengolahan dan daur ulang/pembuangan dan memastikan seluruh kemungkinan kontaminasi telah dicegah (**Gambar 2**).

Dari sisi tata kelola, sangat penting untuk menempatkan penanggung jawab yang jelas di setiap tahapan seperti yang tergambar di **Gambar 2**, dan memastikan koordinasi terjadi di antara mereka.

Tema 2 / Peran Pokja Sanitasi

Pokja Sanitasi yang terdiri dari komposisi multi sektor telah ditunjuk, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, guna memfasilitasi dan mengawasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan strategi kabupaten/kota. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 660^v (SE660) memberikan panduan detil mengenai peran pokja sanitasi di setiap tingkatan. Untuk tingkatan kabupaten/kota, tanggung jawab pokja sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK),
2. Menyiapkan Memorandum Program Sanitasi (MPS),
3. Melaksanakan pengembangan fisik dan non fisik sesuai dengan rencana sanitasi,
4. Mengawasi dan mengevaluasi masuknya alokasi anggaran program dan aktivitas sanitasi ke rencana pembangunan daerah; dan menyiapkan rencana tindak lanjut dan anggaran sesuai SSK/MPS, dan
5. Melaporkan perkembangan SSK/MPS kepada Bupati/walikota serta mengunggah laporan ke National Water and Sanitation System (NAWASIS).

SE660 juga memaparkan siapa saja yang harus terlibat dalam Pokja di tingkat kabupaten/kota (**Gambar 3**).

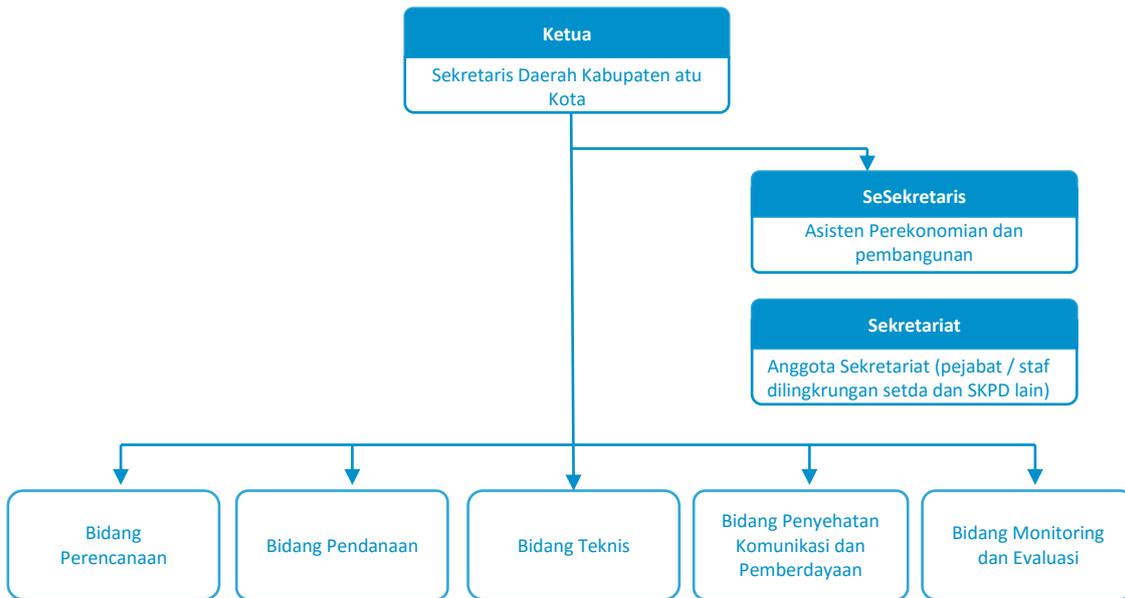
Seluruh pokja di 6 kota studi kasus mengalami beberapa hambatan dalam memenuhi kriteria yang ditentukan dalam SE660. Hambatan yang seringkali diutarakan antara lain menyangkut tingkat senioritas staf yang terlibat dalam pokja yang mengakibatkan kurangnya pengaruh dan otoritas pokja untuk mendorong perubahan dalam sektor sanitasi.

- Surat Edaran 660 memandatkan 5 kegiatan utama kepada para Kepala SKPD, namun pada kenyataannya hanya staf eselon yang lebih rendah yang mengikuti pertemuan-pertemuan pokja.
- Peserta riset memberikan catatan bahwa Kepala SKPD memiliki beban kerja yang tinggi dan pada kenyataannya, sulit untuk meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan pokja.
- Staf kbid/kasi yang menghadiri pertemuan Pokja merasa tidak mudah menjaga kesinambungan informasi dan perkembangan pertemuan kepada atasan mereka: “Kita sudah berikan laporan tertulis, namun mereka tidak memiliki waktu untuk membacanya.”
- Anggota pokja merasa sulit mendorong pekerjaan sub-sektor air limbah karena mereka lebih junior sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.

Pengalaman-pengalaman lain yang diberikan perwakilan Pokja dirangkum dalam tabel berikut (**Tabel 1**).

Terlepas dari tantangan-tantangan yang telah disebutkan, peserta dari perwakilan pemerintah daerah menawarkan sejumlah ide inovatif dan beberapa contoh bagaimana cara mengatasi kesulitan ini.

Gambar 3: Peran Pokja Sanitasi (Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri SE660)



Beberapa ide untuk memecahkan tantangan Pokja sanitasi



- 1 **Dapatkan dukungan dari kepala dinas.** Peserta yang pada umumnya posisi staf biasa hampir semua sepakat bahwa sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari Kepala Dinas agar dapat mendorong pelaksanaan SSK. Di salah satu kasus, staf Pokja merasa bahwa pada umumnya Kepala Dinas akan responsif terhadap arahan dari Bupati dan memberikan saran untuk menggunakan koneksi pribadi dan organisasi untuk melobinya. Misalnya melalui organisasi PKK yang diketuai oleh istri Bupati.
- 2 **Kekuatan satu tujuan.** Di salah satu kasus, kota ini memiliki visi yang solid dan menyatu untuk menjadi tujuan wisata yang sukses dan sanitasi memiliki peran yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menandakan adanya dukungan penuh untuk Pokja dari semua kalangan pengambil keputusan.
- 3 **Pengalokasian anggaran untuk aktivitas Pokja sanitasi.** Di salah satu kasus, Dinas Kesehatan tidak mendapatkan alokasi anggaran operasional untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan SSK. Walaupun begitu, melalui kerjasama antar sektor di Pokja, Bappeda berkomitmen untuk mengambil alih koordinasi dan akan mencari alternatif pendanaan. Di kasus lain, biaya anggaran operasional Pokja dipotong dari APBD karena dilihat tidak mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Untuk mendukung kerja Pokja, akhirnya Bappeda berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran mereka sendiri untuk membiayai anggaran operasional Pokja.

Anggaran operasional yang dialokasikan untuk Pokja bervariasi dari satu kasus ke kasus yang lain— di satu kasus, anggaran Pokja dipotong seluruhnya. Walaupun begitu, ternyata jumlah anggota Pokja tidak berhubungan dengan tingkat frekuensi aktivitas Pokja. Contohnya, beberapa pokja bekerja dengan anggaran yang minimal, bisa mencapai tujuannya ketimbang Pokja yang memiliki anggaran lebih besar, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya (Lihat Tabel 2).

Tema 3 / Tantangan pembiayaan air limbah

Memastikan pendanaan untuk layanan air limbah menjadi tantangan bagi semua peserta riset ini. Sebagian besar kabupaten kota, melalui keanggotaannya di AKKOPSI, telah berkomitmen 2% dari APBD untuk sanitasi. Walaupun begitu, ‘sanitasi’ juga mencakup limbah padat dan drainase, yang jauh lebih dipahami dan dikenal, sehingga alokasi anggarannya bersaing dengan air limbah. Akibatnya, di kebanyakan kasus, air limbah hanya mendapatkan alokasi anggaran yang sangat kecil.



Tabel 1: Pengalaman Umum Pokja Sanitasi yang menjadi peserta Studi Kasus

Peran Pokja*	SKPD yang ditugaskan	Pengalaman umum yang dilaporkan peserta dari enam pemerintah daerah
Kepemimpinan	SEKDA (Ketua Pokja)	Pada kenyataannya, Sekda tidak dapat terlibat dalam manajemen keseharian Pokja Sanitasi karena Sekda memiliki begitu banyak tanggung jawab. Hal ini menyebabkan hilangnya otoritas koordinasi dari Sekda untuk mengatur SKPD dalam pelaksanaan program sanitasi. Namun, karena Sekda adalah pemimpin/pengelola APBD, penting untuk tetap memastikan bahwa Sekda terinformasikan dan terlibat dalam prioritas program sanitasi.
Perencanaan	Bappeda	Di seluruh studi kasus, Bappeda terlibat sebagai Koordinator Pokja. Di kebanyakan kasus, anggaran untuk operasi Pokja biasanya menggunakan anggaran Bappeda. Sehingga peran ini sesuai dengan SE660.
Teknis	PU	PU juga aktif di hampir semua Pokja dan memiliki anggaran terbesar untuk membangun infrastruktur. Kegiatan PU utamanya fokus pada pembangunan fisik, tapi biasanya tidak termasuk aspek non-fisik atau biaya operasi dan perawatan (O&M). Situasi ini menimbulkan hambatan karena dinas yang ditugaskan untuk O&M (Biasanya Dinas Kebersihan dan Pertamanan) biasanya memiliki anggaran yang kecil. Kurangnya perhatian pada aspek non fisik seperti kebutuhan pengguna telah mengakibatkan beberapa investasi menjadi "monumen" yang tidak dimanfaatkan dan terbengkalai.
Sanitasi, Komunikasi & Pemberdayaan	Health	SKPD Kesehatan biasanya terlibat dalam Pokja dan menjadi SKPD yang paling dekat dengan masyarakat. Di beberapa kasus, mereka mengalami hambatan karena kecilnya alokasi anggaran pembinaan/kampanye perubahan perilaku masyarakat. Peran Dinkes sangat penting untuk menciptakan pasar atau kebutuhan akan layanan sanitasi, dan peran Dinkes yang terbatas seperti yang tercantum di SE660 dapat mengakibatkan kinerja sanitasi yang kurang optimal.
Pembiayaan dan penganggaran	Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DP2KAD)	SKPD yang terlibat dalam keuangan biasanya tidak terlibat dalam Pokja Hal ini menyebabkan kesenjangan kapasitas Pokja dalam membuat anggaran kegiatan program PPSP
Pengawasan & Evaluasi	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup juga seringkali tidak terlibat dalam Pokja. Mandat SE660 memberikan peran Pengawasan & Evaluasi kepada dinas ini dan memastikan SKPD lain melaksanakan aktivitas sesuai dengan SSK. Walaupun Dinas Lingkungan terlibat, hanya staf biasa yang melaporkan kesulitan untuk menjalankan peran mereka karena tidak memiliki wewenang. Hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan untuk menilai perkembangan sesuai dengan tujuan PPSP, dan adanya kesenjangan untuk mengidentifikasi ruang perbaikan.

*menurut SE660

Lebih jauh lagi, banyak pokja yang mengutarakan kesulitan untuk mengamankan anggaran untuk aktivitas-aktivitas sesuai dengan mandat SE660 (serta pelaksanaan SSK) karena pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti 'nomenklatur' anggaran yang ditetapkan Kemendagri ketika menyusun program dan aktivitas yang didanai APBD. Nomenklatur ini mengatur nama-nama kegiatan dan urusan yang dapat didanai APBD sesuai dengan Permendagri No. 13/2006. Agar pemerintah daerah dapat menganggarkan aktivitas sanitasi (seperti SE660) dibawah anggaran APBD, mereka harus mengalokasikannya sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan.

Anggaran juga melewati proses pemeriksaan beberapa tahap pengambilan keputusan (Lihat Gambar 4) dan di setiap pos, para pengambil kebijakan ini memutuskan apakah aktivitas sesuai dengan SE660 dapat sesuai dan dapat dimasukkan ke dalam nomenklatur atau tidak. Ketika para pengambil keputusan telah berkomitmen untuk mengimplementasikan PPSP, mereka cenderung memasukkan kegiatan SE660 ke dalam nomenklatur. Sebaliknya, jika komitmen mereka rendah, mereka akan dengan mudah mencoret aktivitas ini.

Peserta riset ini menyarankan adanya intervensi dari Pusat untuk mengamankan alokasi anggaran yang memadai untuk air limbah— misalnya dengan menentukan proporsi anggaran yang harus dialokasikan APBD dan merevisi nomenklatur sehingga anggaran kegiatan SE660 dapat dimasukkan.

Untuk sementara waktu, meraih dukungan dari pimpinan dan pengambil keputusan yang terlibat dalam pengesahan anggaran dapat menghasilkan perbedaan yang sangat besar dalam mengakses pendanaan. Sangatlah penting untuk membangun pengetahuan dan minat dalam sanitasi di kalangan pemerintah, anggota dewan dan walikota/bupati sehingga mereka tidak mencoret pendanaan sanitasi.



Tabel 2: Anggaran Biaya Operasi Pokja Berbanding dengan Aktivitas Pokja

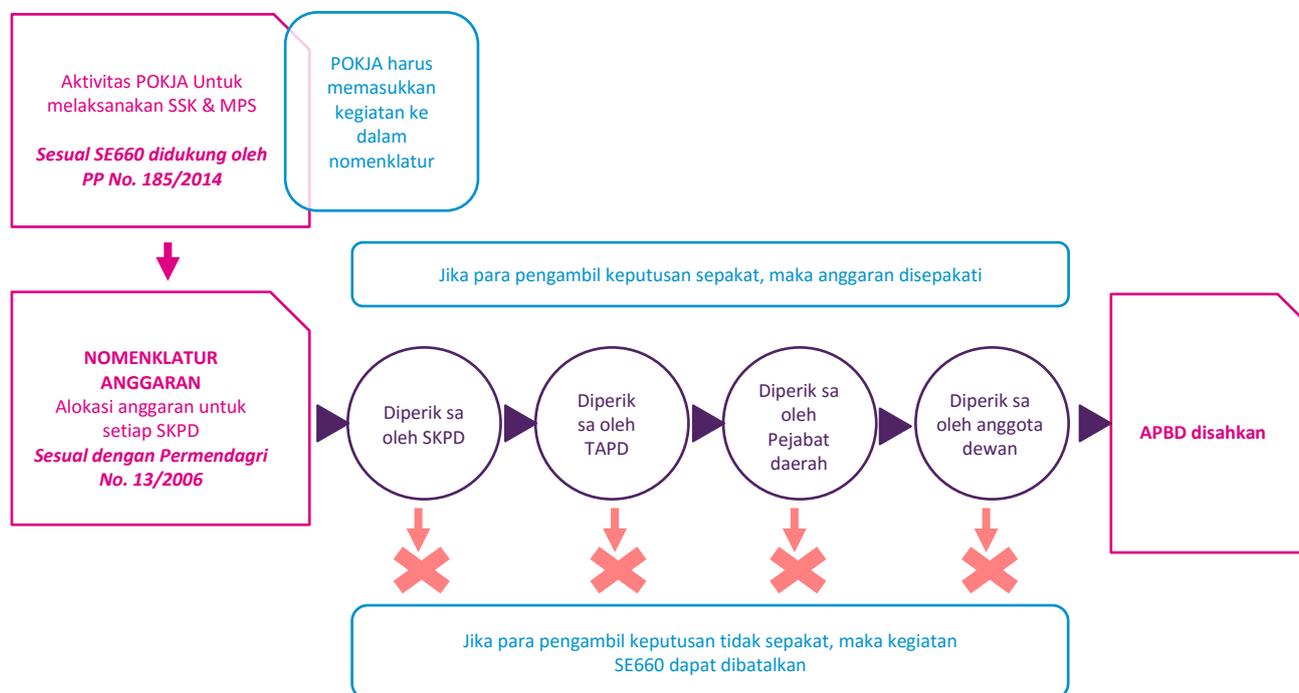
Studi Kasus	Anggaran Pokja (IDR)	Aktivitas Pokja
1	150	Lumayan aktif dan bersemangat untuk meningkatkan efektivitas
2	130	Jarang bertemu; kurang dari 3 kali per tahun
3	70-100	Bertemu jika ada kebutuhan, tidak begitu sering dan biasanya dipicu oleh kunjungan dari lembaga donor.
4	80	Pokja aktif; bertemu 3 kali setahun dan ingin bisa bertemu setiap bulan
5	30	Pokja aktif; mengadakan diskusi-diskusi terarah internal. Mengumpulkan semua honor travel sebagai kompensasi bonus tahunan PNS.
6	0	Pokja tidak dapat bertemu kecuali dapat menunjukkan kepada DPRD bahwa dengan bertemu, mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi atau pendapatan bagi daerah. Bappeda berkomitmen untuk menanggung biaya rapat, namun belum jelas tentang besaran anggaran.

tip* Untuk Pokja: Promosikan Manfaat Berinvestasi di Sektor Sanitasi Studi-studi internasional menunjukkan bahwa aktivitas sanitasi yang sukses dapat berdampak positif terhadap kesehatan. Tingkat orang sakit yang berkurang berarti tingkat partisipasi pendidikan dan produktivitas yang lebih tinggi, yang berdampak pada peningkatan ekonomi. Mempromosikan keuntungan ekonomi bisa menjadi cara alternatif guna meraih persetujuan alokasi pembiayaan

Tema 4 / Investasi air limbah ditentukan sumber pendanaan

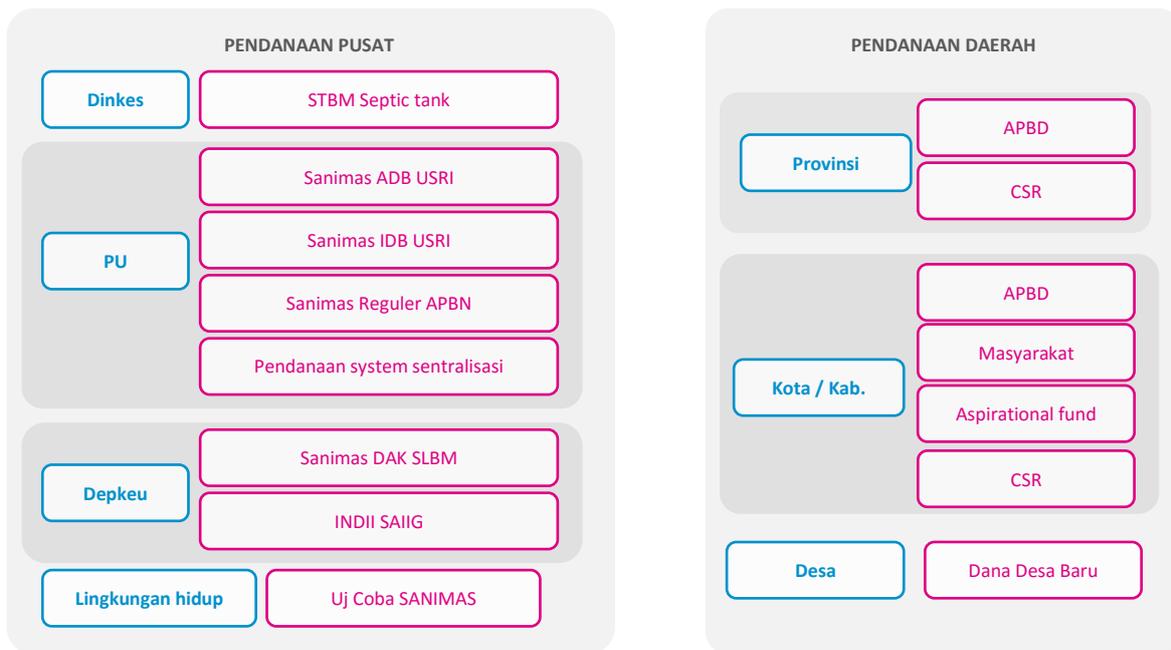
Banyak sumber pendanaan (>15) tersedia untuk kabupaten/kota untuk membantu pembiayaan sistem air limbah terutama bagi kabupaten/kota kecil¹, beberapanya dirangkum di Gambar 5. Catatan tidak semua sumber ini digunakan oleh atau didiskusikan secara langsung dengan seluruh peserta riset ini.

Gambar 4: Bagaimana Aktivitas Air Limbah sesuai dengan Mandat SE660 Berpotensi untuk dicoret dalam Proses Pengesahan APBD



¹ Sumber pendanaan lain tersedia untuk kota-kota yang lebih besar untuk mendanai sistem sanitasi sentralisasi.

Gambar 2. Sumber-sumber Pendanaan di Tingkat Nasional dan Sub-nasional untuk pembangunan infrastruktur air limbah^{vi}



Peserta studi kasus melaporkan bahwa dokumen SSK yang lengkap menjadi prasyarat sebagian besar sumber pendanaan yang mereka ajukan. Banyak peserta riset ini yang melihat SSK sebagai prasyarat mengakses dana daripada melihatnya sebagai dokumen strategis yang dapat membantu perencanaan aktivitas sanitasi mereka.

Meskipun akses pendanaan membutuhkan dokumen SSK yang lengkap, ada kesenjangan besar antara apa yang dibiayai dengan apa yang tertera di SSK. Contohnya, peserta riset melaporkan bahwa ketersediaan lahan lebih berperan menjadi penentu apakah daerah mendapatkan dana bantuan dari pusat, daripada berinvestasi di daerah yang memang membutuhkan sesuai dengan hasil riset risiko kesehatan lingkungan dan SSK, keputusan diambil berdasarkan apakah masyarakat ingin mendonasikan lahannya atau tidak. Hasilnya, pembangunan sektor sanitasi lebih ditentukan oleh kriteria pendanaan daripada SSK. Praktik ini mengabaikan proses pembuatan SSK, dan memperbesar risiko pembangunan dan investasi di sektor sanitasi yang kurang terkoordinasi, kurang efisien dan kurang efektif.

Jenis sumber pendanaan sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi untuk mengakses pendanaan dan tingkat tanggung jawab serta komitmen yang dibutuhkan dari pemerintah daerah. Sumber pendanaan yang berbeda menggunakan cakupan teknologi yang berbeda pula (**Gambar 6**), dengan dominasi pendanaan untuk sistem Sanimas: sistem sanitasi lingkungan yang dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat. Sumber pendanaan terbesar untuk air limbah di 6 kasus berasal dari Sanimas DAK SLBM, yang mana merupakan dana transfer Pusat ke APBD.

Tema 5 / Ide pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan air limbah

Banyak inisiatif-inisiatif positif yang dikemukakan perwakilan pemerintah daerah di 6 daerah studi kasus. Kerja keras mereka memberikan pembelajaran yang berharga bagi pokja lain untuk dapat memperkuat pengaruh dan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan layanan air limbah.

Pemberdayaan komunitas

- Meningkatkan kesadaran komunitas: Menggerakkan tokoh-tokoh lokal untuk meningkatkan kesadaran pentingnya layanan air limbah yang baik dan higienis.² Gunakan kegiatan-kegiatan berbasis budaya, Jumatan dan forum masyarakat lainnya sesering mungkin.
- Manfaatkan kesempatan Musrenbang: Gerakkan komunitas melalui musrenbang untuk mendukung rencana-rencana sanitasi. Hal ini dapat membantu para pengambil kebijakan untuk mengesahkan anggaran sanitasi.

² Sangat penting untuk mengingat bahwa pesan “meningkatkan kesehatan” saja tidaklah cukup dan pesan harus dihubungkan dengan status sosial, modernitas, manfaat ekonomi yang dapat mengarahkan perubahan perilaku.

Gambar 6: Sumber Pendanaan dan Jenis Teknologi yang Didukungnya

On-site septic tank	Skala komunitas	Off-site	Spesifik sesuai konteks
Program STBM	Sanimas ADB USRI	INDII SAIIG	APBD Provinsi
	Sanimas IDB USRI	ABBN untuk system sentralisasi	CSR Provinsi
	Sanimas Reguler ABPN		APBD Kab/Kota
	Sanimas DAK SLBM		Musrembang
	Percobaan SANIMAS oleh Kementerian Lingkungan		Dana Aspirasi
			CSR Kab/Kota
			Dana Desa

- Undang para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi: Libatkan tokoh-tokoh masyarakat di luar Pokja untuk memberikan masukan terhadap SSK, khususnya mereka yang memiliki pengalaman langsung di bidang sanitasi, ataupun mantan anggota Pokja yang dapat mendukung keberlangsungan pengetahuan dan pengalaman tentang sanitasi di dalam Pokja.

Meraih dukungan untuk aktivitas Pokja

- Libatkan mereka yang dapat membantu kampanye Anda: Di salah satu studi kasus, Pokja melibatkan (PKK) dalam diskusi bagaimana dengan meningkatkan layanan air limbah dapat sejalan dengan program mereka. Pokja mendorong PKK untuk melobi Walikota dan Sekda untuk meningkatkan dukungan aktivitas Pokja, misalnya melalui aktifnya kepala-kepala SKPD.
- Gunakan arahan Pemerintah Pusat: Banyak peserta yang mengatakan bahwa pemerintah daerah tunduk terhadap arahan dari Pusat sehingga memposisikan isu air limbah sebagai mandat dari pusat, sangat mendukung pengesahan pendanaan air limbah. Tunjukkan kepada para pengambil kebijakan di tingkat lokal bahwa “Program sanitasi ini adalah instruksi pemerintah pusat” dapat meraih dukungan dan persetujuan anggaran sanitasi seperti Program SAIIG.
- Menggunakan Kekuatan dan otoritas Bappeda: Bappeda seringkali memiliki keleluasaan lebih otonom di lapangan, dan kemungkinan besar dapat menggerakkan aktivitas Pokja. Di salah satu kasus, Bappeda dapat menanggung biaya pertemuan Pokja ketika anggaran Pokja dipotong oleh anggota dewan.



ⁱ Mitchell et al, 2015. *Effective governance for the successful long-term operation of community scale air limbah systems: Mid-term observations report*. March 2015. Oleh the Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney.

ⁱⁱ Millenium Development Goal 7 (MDG7) Target 10 adalah untuk memotong setengah proporsi penduduk tanpa akses air dan sanitasi dasar yang berarti meraih cakupan sanitasi sebesar 75%: <http://www.un.org/waterforlifedecade/sanitation.shtml>

ⁱⁱⁱ UN, 2015. Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals.

^{iv} Mitchel et al, 2015.

^v Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2012, Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah. [Guidelines for the Management of Settlement Sanitation Development Acceleration Program (PPSP) in the Region.]

^vPenjelasan program pendanaan: STBM adalah program yang menargetkan keluarga. Program USRI untuk (Sanimas) didanai oleh Asian Development Bank (ADB) hingga tahun 2014, dan sekarang didanai oleh the Islamic Development Bank (IDB). Sanimas Reguler adalah dana transfer dari pusat untuk dana tambahan administrasi. DAK SLBM adalah Dana Bantuan Alokasi Khusus untuk Sanimas. SAIIG adalah program didanai oleh Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) untuk membangun jaringan sanitasi di kota kecil yang dioperasikan oleh pemerintah kota/daerah. APBD adalah dana yang bersumber dari lokal. CSR adalah pendanaan dari swasta melalui *corporate social responsibility*. Pendanaan Masyarakat diperoleh dari dana iuran dan hibah. Dana aspirasi adalah dana yang diberikan kepada anggota dewan yang digunakan untuk konstituen mereka. Dana Desa adalah alokasi dana baru yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada desa sesuai dengan UU Desa 2014.